



Rudy C Tarumingkeng:

GEOPOLITIK PANGAN

Antara Ketergantungan Impor dan
Upaya Membangun Kemandirian Nasional

*Rudy C Tarumingkeng: Geopolitik Pangan -- Antara Ketergantungan
Impor dan Upaya Membangun Kemandirian Nasional*

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

10 December 2025

GEOPOLITIK PANGAN: ANTARA KETERGANTUNGAN IMPOR DAN UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN NASIONAL

Geopolitik pangan pada dasarnya menjelaskan bagaimana pangan—yang tampak “sekadar” urusan dapur—sebenarnya adalah sumber daya strategis yang dapat menentukan stabilitas politik, kekuatan ekonomi, bahkan posisi tawar sebuah negara di panggung global. Di balik beras, gandum, kedelai, gula, dan berbagai komoditas pangan, tersimpan jaringan kekuasaan, kepentingan, serta ketimpangan antara negara produsen dan negara konsumen.

Dalam konteks ini, tema **“Geopolitik Pangan: Antara Ketergantungan Impor dan Upaya Membangun Kemandirian Nasional”** mengajak kita melihat pangan bukan hanya sebagai persoalan teknis produksi, tetapi sebagai medan kontestasi kekuasaan: siapa menguasai benih, pupuk, logistik, dan pasar—dialah yang menguasai masa depan.

Di bawah ini, pembahasan disusun secara naratif dengan logika bertahap: dari konsep geopolitik pangan, peta ketergantungan impor global dan Indonesia, hingga skenario dan strategi kemandirian nasional.

I. Pendahuluan: Pangan sebagai Isu Kekuasaan, Bukan Sekadar Konsumsi

Selama bertahun-tahun, diskursus pangan di banyak negara berkembang lebih sering dipandang sebagai isu teknis: bagaimana meningkatkan produksi, mengatasi gagal panen, atau menstabilkan

harga di pasar. Namun, krisis pangan global, konflik Rusia–Ukraina, dan perubahan iklim telah memperlihatkan satu hal: **pangan adalah isu geopolitik**.

Beberapa fakta penting:

- Perang Rusia–Ukraina mengganggu jalur ekspor gandum dan jagung dari kawasan Laut Hitam, membuat harga gandum dunia melonjak hingga puluhan persen dalam hitungan minggu dan memicu krisis di negara-negara importir di Afrika dan Timur Tengah. ([ScienceDirect](#))
- Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir 30% ekspor gandum dunia sebelum perang. Ketika jalur ekspor terganggu, stabilitas pangan global ikut terguncang. ([ResearchGate](#))
- Harga pupuk juga melonjak karena konflik tersebut, membuat biaya produksi pangan di seluruh dunia meningkat tajam. ([connections-qj.org](#))

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi lebih sensitif karena:

1. Kita masih mengimpor beberapa komoditas strategis: gandum, kedelai, gula, garam, dan sebagian daging serta produk susu. ([AJHSSR](#))
2. Kebijakan nasional secara politik “tidak nyaman” dengan ketergantungan impor, terutama beras, sehingga isu pangan selalu dekat dengan politik dan stabilitas pemerintahan. ([citi.uph.edu](#))

Dengan demikian, ketergantungan impor bukan sekadar soal neraca perdagangan, tetapi menyimpan risiko **kerawanan geopolitik**: ketika sumber pasokan terganggu, ketika negara pengekspor menggunakan pangan sebagai instrumen tekanan, atau ketika pasar global mengalami spekulasi dan volatilitas ekstrem.

II. Memahami Geopolitik Pangan

1. Dari Geopolitik Energi ke Geopolitik Pangan

Jika di abad ke-20 dunia banyak berbicara tentang **geopolitik minyak dan gas**, maka abad ke-21 menambahkan satu dimensi baru: **geopolitik pangan**. Keduanya mirip: sama-sama berbicara tentang sumber daya vital, distribusi yang tidak merata, dan potensi “senjata” berupa embargo, pembatasan ekspor, atau permainan harga.

Geopolitik pangan dapat didefinisikan sebagai “*cara negara dan aktor non-negara memanfaatkan produksi, distribusi, dan perdagangan pangan untuk memperkuat posisi tawar, mempertahankan stabilitas domestik, atau menekan pihak lain*”. Dalam kerangka ini, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi:

- **Instrumen diplomasi** (food aid, bantuan pangan, kerja sama lumbung pangan),
- **Instrumen tekanan** (embargo pangan, pembatasan ekspor, manipulasi pasokan),
- **Sumber legitimasi politik domestik** (stabilitas harga beras sebagai basis dukungan rakyat).

Konsep **food weaponization** atau “pangan sebagai senjata” menggambarkan penggunaan pangan (atau kelangkaannya) secara sengaja untuk mempengaruhi keputusan politik suatu pihak. ([securityconference.org](https://www.securityconference.org))

2. Food Security, Food Sovereignty, dan Kemandirian Pangan

Tiga konsep penting sering muncul dalam diskursus pangan:

1. Food Security (Keamanan Pangan)

Menurut FAO, keamanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ini menekankan **akses**

dan **ketersediaan**, tanpa selalu mensyaratkan bahwa pangan tersebut diproduksi di dalam negeri.

2. **Food Sovereignty (Kedaulatan Pangan)**

Konsep ini menekankan hak negara dan komunitas untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri: mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai lokal, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Di sini muncul tuntutan untuk mengurangi dominasi korporasi global dan spekulasi pasar.

3. **Food Self-Sufficiency / Kemandirian Pangan**

Kemandirian pangan menekankan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pokok pangannya dari produksi domestik, minimal untuk komoditas strategis. Istilah ini sangat menonjol dalam kebijakan Indonesia yang sejak awal kemerdekaan menjadikan swasembada (terutama beras) sebagai agenda politik utama. (citi.uph.edu)

Dalam geopolitik pangan, **ketiga konsep ini sering tegang satu sama lain**. Negara bisa saja mencapai keamanan pangan (banyak stok dan harga stabil) tetapi sangat bergantung pada impor, sehingga kedaulatan dan kemandiriannya rapuh. Tantangannya adalah mencari kombinasi optimal: keterbukaan perdagangan global *tanpa* terjebak dalam ketergantungan yang berisiko tinggi.

III. Peta Ketergantungan Impor Pangan di Dunia

1. Konsentrasi Produsen dan Eksportir Besar

Salah satu akar geopolitik pangan adalah **ketidakseimbangan**: tidak semua negara memiliki kapasitas produksi yang sama, tetapi semua negara butuh pangan. Beberapa fakta kunci:

- **Gandum**: ekspor dunia didominasi oleh beberapa negara seperti Rusia, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Rusia dan Ukraina saja menyumbang hampir 30% ekspor global gandum sebelum konflik. ([ResearchGate](https://www.researchgate.net))

- **Kedelai dan jagung:** Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina adalah pemain utama.
- **Beras:** ekspor terkonsentrasi di Asia (Thailand, Vietnam, India, Pakistan), sementara banyak negara Afrika dan Timur Tengah menjadi importir utama. ([Consilium](#))

Konsentrasi produsen ini membuat banyak negara importir berada dalam posisi rentan. Ketika salah satu eksportir besar terganggu (karena konflik, embargo, atau bencana iklim), efek *domino* langsung terasa di seluruh dunia melalui lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

2. Negara-Negara Rentan: Antara Iklim dan Kapasitas Produksi

Beberapa negara hampir sepenuhnya bergantung pada impor untuk bahan pangan pokok mereka. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, misalnya, sangat bergantung pada gandum impor karena keterbatasan lahan subur dan air. Ketika harga gandum melambung akibat perang atau larangan ekspor, stabilitas sosial mereka langsung terancam. ([SDG Knowledge Hub](#))

Di sisi lain, perubahan iklim melanda daerah yang selama ini menjadi “lumbung pangan” dunia. Beberapa tahun terakhir, misalnya, petani di Inggris mengalami salah satu musim panen terburuk akibat kombinasi panas ekstrem dan kekeringan, memicu kerugian ratusan juta pound dan memperlihatkan bagaimana iklim memperburuk ketidakpastian produksi pangan. ([The Guardian](#))

Kombinasi **keterbatasan domestik, ketergantungan impor, dan guncangan harga global** inilah yang menjadi inti kerentanan geopolitik pangan banyak negara.

IV. Ketergantungan Impor Pangan Indonesia: Posisi dan Kerentanan

1. Gambaran Umum: Dari Beras ke Gandum, Gula, dan Kedelai

Indonesia sering dilihat sebagai negara agraris dengan potensi besar. Namun dalam kenyataannya, untuk beberapa komoditas strategis, Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang signifikan, antara lain:

- **Gandum:** hampir seluruh kebutuhan gandum (untuk mi instan, roti, dan produk tepung) diimpor karena gandum hampir tidak dibudidayakan secara komersial di dalam negeri. ([AJHSSR](#))
- **Kedelai:** kebutuhan industri tempe dan tahu sebagian besar dipenuhi dari impor, karena produksi domestik belum mampu mengejar permintaan. ([ResearchGate](#))
- **Gula:** Indonesia masih mengimpor jutaan ton gula per tahun untuk menutup defisit antara kebutuhan dan produksi domestik. ([review.e-siber.org](#))
- **Garam:** meskipun negara kepulauan, kualitas dan kapasitas produksi garam rakyat belum sepenuhnya memenuhi standar dan volume industri, sehingga impor tetap dilakukan. ([AJHSSR](#))

Untuk **beras**, posisi Indonesia lebih kompleks. Secara politik, impor beras sangat sensitif. Sejak lama, pemerintah menargetkan swasembada beras dan menjadikannya simbol kemandirian. Namun dalam praktiknya, Indonesia tetap beberapa kali mengimpor beras ketika stok menipis atau terjadi guncangan produksi. ([citi.uph.edu](#))

2. Mengapa Ketergantungan Impor Terjadi?

Ketergantungan ini bukan sekadar akibat “kegagalan petani”, tetapi hasil kombinasi faktor:

1. Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Pola Konsumsi

Urbanisasi, naiknya kelas menengah, dan perubahan gaya hidup meningkatkan konsumsi produk tepung, daging, susu, dan gula. Banyak dari bahan bakunya berbasis komoditas impor (gandum, kedelai, susu bubuk, gula rafinasi).

2. Keterbatasan Sumber Daya (Lahan dan Air)

Konversi lahan pertanian ke non-pertanian, fragmentasi

kepemilikan lahan, dan degradasi tanah menekan kapasitas produksi domestik.

3. Produktivitas dan Efisiensi Rantai Pasok

Produktivitas komoditas tertentu (misalnya kedelai dan gula) tidak tumbuh secepat peningkatan permintaan, sementara efisiensi logistik dan rantai pasok sering tertinggal, membuat biaya produksi domestik relatif tinggi.

4. Struktur Pasar dan Kebijakan Perdagangan

Beberapa studi menunjukkan bahwa impor komoditas pangan strategis di Indonesia kerap didominasi oleh segelintir pelaku usaha, dengan tata kelola yang tidak selalu transparan dan efisien. (kppu.go.id)

Akibatnya, **impor menjadi “jalan cepat”** untuk menstabilkan pasokan dan harga dalam jangka pendek—tetapi secara jangka panjang memperkuat **path dependency** terhadap pasar internasional.

V. Konflik, Perang, dan Guncangan Pangan Global

1. Kasus Rusia–Ukraina: Ketika Laut Hitam Menjadi “Lambung Dunia”

Perang Rusia–Ukraina memberikan ilustrasi konkret bagaimana konflik regional dapat mengguncang sistem pangan global:

- Sebelum perang, Rusia dan Ukraina adalah eksportir utama gandum dan jagung, dengan pangsa sekitar 21% dan 7–8% ekspor gandum global. ([ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/358111111))
- Invasi Rusia pada 2022 mengganggu pengiriman melalui Laut Hitam, menaikkan biaya asuransi kapal dan memicu lonjakan harga gandum, jagung, dan minyak nabati. ([Consilium](https://www.consilium.com/en/analysis/2022/04/22/russia-ukraine-war-impacts-on-global-food-supply))
- Harga pupuk naik tajam karena Rusia dan Belarus adalah produsen utama pupuk nitrogen dan kalium. ([connections-qj.org](https://www.connections-qj.org/))

Studi empirik menunjukkan bahwa perang ini memicu lonjakan harga global: wheat sampai sekitar 50–55%, jagung di atas 20%, dan kedelai sekitar 9–15% pada fase awal konflik. ([ScienceDirect](#))

Bagi negara importir seperti Indonesia, dampaknya tidak hanya terasa dalam naiknya harga gandum, tetapi juga biaya pakan ternak dan pupuk, yang pada gilirannya mempengaruhi harga daging, telur, dan produk pangan lainnya. Inilah salah satu bentuk “**efek rambatan**” geopolitik dalam pangan.

2. Pupuk Sebagai “Leher Botol” Geopolitik Pangan

Tidak cukup hanya melihat output (beras, jagung, gandum). Input produksi—terutama pupuk—juga merupakan titik rawan geopolitik:

- Konflik Rusia–Ukraina dan pembatasan ekspor pupuk menyebabkan keketatan pasokan dan lonjakan harga, sehingga banyak petani di negara berkembang mengurangi pemupukan dan menurunkan intensitas tanam. ([connections-qj.org](#))
- Di Ukraina sendiri, pembatasan impor pupuk melalui laut berpotensi menurunkan hasil panen hingga 30%, yang artinya mengurangi pasokan ekspor puluhan juta ton sereal ke dunia. ([Reuters](#))

Dengan kata lain, **menguasai pupuk dan input pertanian** berarti memiliki pengaruh signifikan dalam geopolitik pangan. Negara yang tidak mandiri dalam produksi atau pasokan pupuk berada dalam posisi rentan.

VI. “Food Weaponization”: Pangan sebagai Senjata Tekanan

Konsep **food weaponization** merujuk pada penggunaan pangan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik atau keamanan—misalnya dengan:

- Mengatur volume dan timing ekspor untuk mempengaruhi harga global,

- Menggunakan embargo atau larangan ekspor untuk menekan negara tertentu,
- Menjadikan bantuan pangan sebagai alat diplomasi atau alat tawar.

Beberapa studi, misalnya terkait embargo pangan dalam krisis Qatar–Gulf, menunjukkan bagaimana pangan diposisikan sebagai senjata simbolik sekaligus material dalam konflik politik kawasan. ([ResearchGate](#))

Analisis mutakhir mengenai **“food weaponization”** menegaskan bahwa:

“Manipulasi sumber daya pangan adalah taktik khas dalam perang hibrida (hybrid warfare), digunakan untuk mendestabilisasi lawan tanpa harus mengerahkan senjata konvensional.” ([Small Wars Journal](#))

Dalam konteks ini, negara yang sangat bergantung pada impor, tetapi tidak memiliki diversifikasi sumber pasokan dan cadangan strategis yang memadai, berada dalam posisi **“sandera struktural”**: secara formal merdeka, tetapi secara faktual sangat terpengaruh keputusan negara pengekspor dan dinamika pasar global.

VII. Upaya Global Mengurangi Kerentanan: Dari Cadangan Pangan ke Diplomasi

Sebagai respon, banyak negara mengambil beberapa langkah:

1. Diversifikasi Sumber Impor

Tidak lagi bergantung pada satu atau dua negara pemasok. Importir gandum, misalnya, mulai mengalihkan pembelian dari Laut Hitam ke Australia, Uni Eropa, atau Kanada ketika ekspor dari Rusia–Ukraina terganggu. ([Economic Research Service](#))

2. Cadangan Pangan Strategis

Membangun stok cadangan (buffer stock) di level nasional dan regional untuk menghaluskan guncangan pasokan dan harga.

3. Kerja Sama Regional dan Diplomasi Pangan

Membentuk *grain pool*, perjanjian ekspor-impor jangka panjang, serta koordinasi regional seperti di ASEAN untuk saling membantu dalam situasi darurat.

4. Investasi dalam Ketahanan Iklim

Mengembangkan varietas tahan kekeringan, memperbaiki tata kelola air, dan mendorong praktik pertanian regeneratif untuk mengurangi kerentanan terhadap cuaca ekstrem. ([The Guardian](#))

Indonesia, sebagai negara besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, tidak dapat mengabaikan dinamika global ini. Pertanyaannya: bagaimana mengelola ketergantungan impor sekaligus membangun kemandirian nasional?

VIII. Kemandirian Pangan sebagai Agenda Politik Indonesia

1. Warisan Historis: Swasembada sebagai Simbol

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menempatkan pangan—terutama **beras**—sebagai komoditas politik:

- Beras adalah makanan pokok mayoritas penduduk, sehingga ketersediaan dan stabilitas harganya sangat menentukan stabilitas sosial dan politik.
- Pemerintah menerapkan program intensifikasi, subsidi, dan penguatan BULOG untuk mengelola harga, stok, dan impor beras. (kppu.go.id)

Swasembada beras pernah menjadi simbol keberhasilan pembangunan pada era tertentu, tetapi tantangan terus muncul: pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, stagnasi produktivitas, dan perubahan iklim.

2. Posisi Indonesia di Indeks Keamanan Pangan Global

Menurut berbagai analisis, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam aspek ketersediaan dan akses pangan, tetapi masih menghadapi kerentanan:

- Diukur melalui **Global Food Security Index (GFSI)**, Indonesia berada di kelompok menengah dengan tantangan pada aspek akses, kualitas, serta keberlanjutan jangka panjang. (cgd.abc-institute.id)
- Ketergantungan terhadap impor komoditas tertentu dan kerentanan terhadap guncangan harga global tetap menjadi isu penting.

3. Kebijakan Kontemporer: Menuju Kemandirian dan Kepemimpinan Pangan

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menegaskan kembali agenda **kemandirian pangan**, terutama:

- **Percepatan swasembada beras** dan peningkatan kapasitas produksi domestik melalui modernisasi pertanian, penggunaan teknologi, dan pembangunan sentra-sentra produksi pangan baru. (ANTARA News)
- Pembentukan dan penguatan BUMN atau perusahaan negara di bidang pangan (misalnya pengembangan perusahaan negara yang menangani lahan besar, rice estate, lumbung pangan baru).
- Program **makan bergizi gratis** untuk anak sekolah dan ibu hamil, yang sekaligus diarahkan untuk menyerap produk petani lokal dan meningkatkan gizi generasi muda. (AP News)

Secara geopolitik, langkah-langkah ini memiliki dua dimensi:

1. **Domestik:** memperkuat legitimasi pemerintah, mengurangi kerentanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
2. **Internasional:** mendorong Indonesia sebagai **pemain penting dalam arsitektur pangan regional**, tidak hanya sebagai importir tetapi juga sebagai mitra strategis dan, dalam jangka panjang, mungkin sebagai eksportir untuk komoditas tertentu.

IX. Strategi Membangun Kemandirian Pangan di Tengah Keterhubungan Global

Kemandirian pangan **bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional**, tetapi menempatkan diri pada posisi yang tidak mudah diguncang oleh gejolak pasar global. Beberapa strategi utama dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Memperkuat Produksi Domestik yang Berkelanjutan

- **Intensifikasi selektif:** meningkatkan produktivitas untuk komoditas kunci (beras, jagung, kedelai, gula, dan protein hewani) melalui benih unggul, praktik agronomi yang baik, dan digital farming.
- **Ekstensifikasi terkendali:** membuka lahan baru secara hati-hati tanpa merusak ekosistem kritis (hutan primer, gambut).
- **Pertanian regeneratif:** memperbaiki kesehatan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor, dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap iklim.

Strategi ini harus selalu dipadukan dengan agenda **ketahanan iklim** agar peningkatan produksi tidak justru menciptakan kerentanan baru di masa depan.

2. Diversifikasi Pangan Lokal: Dari “Beras-Sentris” ke “Pangan Nusantara”

Kemandirian tidak harus berarti semua pangan bergantung pada **beras**. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal:

- Sagu, singkong, ubi, sorgum, jagung lokal,
- Pangan laut dan perikanan,
- Aneka kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Diversifikasi konsumsi (melalui edukasi, program pemerintah, dan inovasi industri pangan) dapat:

- Mengurangi tekanan terhadap beras,
- Membuka peluang ekonomi baru di daerah,
- Memperkuat identitas kuliner nasional.

3. Reformasi Kebijakan Impor dan Tata Kelola Pasar

Kebijakan impor perlu didesain agar:

- **Tidak mematikan insentif bagi petani** (misalnya impor dilakukan transparan, berbasis data produksi dan stok yang akurat),
- **Mengurangi oligopoli dan rente** dalam perizinan impor,
- **Mendorong investasi dalam produksi domestik** melalui kepastian harga, subsidi tertarget, dan kontrak jangka panjang.

Penegakan hukum persaingan usaha yang tegas terhadap kartel dan praktik anti-kompetitif di sektor pangan menjadi bagian penting dari strategi kemandirian. (kppu.go.id)

4. Diplomasi Pangan dan Kerja Sama Regional

Kemandirian tidak berarti isolasi. Indonesia dapat:

- Membangun **perjanjian pasokan jangka panjang** dengan negara produsen untuk komoditas yang sulit diproduksi di dalam negeri (misalnya gandum).
- Menginisiasi **kerja sama cadangan pangan regional** di ASEAN, sehingga ketika satu negara terkena bencana atau gagal panen, negara lain siap membantu.
- Menggunakan keunggulan sebagai negara besar di Asia Tenggara untuk mempromosikan “*food security architecture*” regional yang adil dan berkelanjutan.

5. Teknologi dan Inovasi: Dari Data ke Keputusan

Penerapan teknologi—termasuk AI—dapat memperkuat kemandirian pangan melalui:

- **Sistem informasi pangan real-time** (harga, stok, distribusi) untuk menghindari kebijakan impor yang panik atau terlambat,
- **Precision agriculture** (sensor, drone, satelit) untuk memaksimalkan hasil dengan input minimal,

- **Platform digital** yang menghubungkan petani dengan pasar, mengurangi panjangnya rantai distribusi dan meningkatkan bagian pendapatan yang diterima petani.

Inisiatif seperti pembangunan kawasan pangan modern dengan mesin canggih, drone, dan pemantauan satelit—sebagaimana mulai dikembangkan dalam beberapa proyek nasional—menunjukkan arah ke **pertanian modern berbasis data**.([Reuters](#))

X. Tantangan Struktural: Lahan, Petani, dan Tata Kelola

Meski strategi di atas menjanjikan, ada sejumlah tantangan struktural yang tidak boleh diabaikan:

1. Struktur Kepemilikan Lahan

Fragmentasi lahan, ketimpangan kepemilikan, dan lemahnya reforma agraria membuat banyak petani kecil sulit berinvestasi dalam teknologi dan peningkatan produktivitas.

2. Regenerasi Petani

Usia rata-rata petani menua, sementara generasi muda enggan terjun ke pertanian karena dianggap kurang prestisius dan berisiko tinggi. Tanpa regenerasi, kemandirian pangan hanya menjadi wacana.

3. Kapasitas Kelembagaan

Data pangan sering tidak akurat atau tidak sinkron antar lembaga. Tanpa data yang kredibel, kebijakan impor, subsidi, dan cadangan tidak akan tepat sasaran.

4. Oligopoli dan Praktik Dagang Tidak Sehat

Beberapa komoditas kunci dikuasai oleh sekelompok pelaku besar, baik di sisi impor maupun distribusi. Hal ini menciptakan ruang rente, praktik kartel, dan menekan petani produsen. (kppu.go.id)

5. Dinamika Politik Jangka Pendek

Kebijakan pangan sering kali sangat dipengaruhi siklus politik (pemilu, reshuffle), sehingga program jangka panjang kerap

berubah-ubah, padahal sektor pangan membutuhkan konsistensi puluhan tahun.

XI. Skenario Masa Depan: Antara Ketergantungan, Kemandirian, dan Kepemimpinan

Jika kita memproyeksikan ke depan, setidaknya ada tiga skenario bagi Indonesia dalam geopolitik pangan.

Skenario 1: Ketergantungan Tinggi yang Dipertahankan

Dalam skenario ini, Indonesia tetap bergantung pada impor gandum, kedelai, gula, dan beberapa komoditas lain tanpa transformasi signifikan di hulu. Perdagangan internasional tetap menjadi penyangga utama, tetapi:

- Indonesia sangat sensitif terhadap guncangan harga global,
- Defisit transaksi berjalan berpotensi melebar ketika harga pangan dunia naik,
- Ruang fiskal untuk program sosial dan pembangunan lain tertekan.

Secara geopolitik, posisi tawar Indonesia dalam isu pangan tidak kuat, dan selalu berada dalam posisi reaktif terhadap dinamika eksternal.

Skenario 2: Kemandirian Terkendali dalam Sistem Global Terbuka

Di sini, Indonesia:

- Memperkuat produksi domestik dan keberlanjutan,
- Mengurangi impor untuk komoditas yang secara agro-ekologi memungkinkan ditingkatkan di dalam negeri,
- Tetap memanfaatkan perdagangan global untuk komoditas yang secara struktural lebih efisien diimpor (misalnya gandum),

- Membangun cadangan strategis dan memperkuat diplomasi pangan.

Kemandirian bukan berarti “menolak impor”, tetapi memastikan bahwa **impor adalah pilihan strategis, bukan keterpaksaan struktural**.

Skenario 3: Indonesia sebagai Pusat Pangan Regional

Dalam skenario jangka panjang yang ambisius, Indonesia:

- Berhasil mengembangkan kawasan-kawasan pangan modern,
- Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan secara simultan,
- Mengurangi impor komoditas utama, dan bahkan menjadi eksportir untuk beberapa komoditas (misalnya produk hortikultura, perikanan, dan pangan olahan bernilai tambah tinggi).

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mandiri, tetapi juga **memainkan peran kepemimpinan** dalam arsitektur pangan ASEAN dan Indo-Pasifik.

XII. Penutup: Menjahit Kedaulatan, Keamanan, dan Kemandirian Pangan

Geopolitik pangan menyingkap fakta bahwa:

- Pangan adalah **sumber daya strategis** yang bisa menjadi alat diplomasi, senjata tekanan, maupun sumber legitimasi politik.
- Ketergantungan impor menempatkan negara pada posisi rawan terhadap guncangan eksternal: konflik, embargo, spekulasi pasar, dan perubahan iklim.
- Upaya membangun kemandirian pangan nasional tidak bisa hanya bersandar pada slogan, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh: dari struktur lahan, produktivitas, tata kelola pasar, hingga diplomasi dan teknologi.

Bagi Indonesia, **tantangan utamanya** adalah merancang jalan tengah yang cerdas:

1. Tidak terjebak dalam ilusi swasembada total yang justru bisa tidak efisien dan merusak lingkungan.
2. Tidak pula terlena pada kenyamanan impor murah yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi krisis akibat guncangan geopolitik.

Yang dibutuhkan adalah **kemandirian terkendali**: kombinasi antara penguatan produksi domestik, diversifikasi pangan lokal, tata kelola impor yang transparan, cadangan strategis, dan diplomasi pangan yang aktif.

Dalam dunia yang ditandai konflik, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik, kemandirian pangan bukan sekadar agenda sektor pertanian, tetapi **fondasi kedaulatan nasional**—sebuah prasyarat agar Indonesia dapat melangkah mantap menuju masa depan yang stabil, adil, dan bermartabat.

-
- [Financial Times](#)
 - [The Guardian](#)
 - [Reuters](#)
 - [AP News](#)

REFLEKSI DAN DISKUSI

untuk artikel *“Geopolitik Pangan: Antara Ketergantungan Impor dan Upaya Membangun Kemandirian Nasional”*.

A. Refleksi Kritis: Pangan, Kekuasaan, dan Masa Depan Bangsa

1. Dari Dapur ke Diplomasi

Ketika harga beras, minyak goreng, atau gandum naik, yang tampak di permukaan adalah keluhan rumah tangga, antrean di pasar, dan berita di media. Namun di balik itu, bekerja kekuatan-kekuatan besar: negara eksportir yang mengatur kuota, korporasi global yang mengendalikan rantai pasok, spekulasi yang bermain di bursa komoditas, dan pemerintah domestik yang berusaha menenangkan gejolak sosial.

Refleksi pertama yang penting adalah:

pangan bukan hanya urusan “perut”, tetapi urusan “kedaulatan”.

Bangsa yang tidak mampu mengelola pangan akan selalu mudah diguncang oleh krisis luar, sekalipun PDB-nya tampak tinggi di atas kertas. Dengan kata lain, *kemerdekaan formal* tidak selalu identik dengan *kemerdekaan substantif* apabila pangan, energi, dan teknologi sepenuhnya bergantung pada pihak lain.

2. Ketergantungan Impor: Rasional atau Berbahaya?

Impor pangan tidak selalu salah. Secara ekonomi, perdagangan internasional memungkinkan negara memperoleh komoditas dengan harga lebih murah dari negara yang memiliki keunggulan komparatif. Namun refleksi kritisnya:

- Sampai batas mana kita bisa menganggap impor itu “rasional”, dan kapan ia berubah menjadi “berbahaya”?
- Apakah kita mengimpor karena memang lebih efisien, atau karena kebijakan jangka panjang kita tidak konsisten, lahan pertanian tergerus, dan tata kelola subsidi tidak berpihak pada petani?

Di titik ini, diskusi tentang **geopolitik pangan** mengajak kita menimbang kembali paradigma “murah hari ini” vs “aman jangka panjang”. Harga yang murah sesaat dapat dibayar mahal ketika krisis datang: depresiasi nilai tukar, lonjakan harga global, embargo, atau perang.

3. Pangan sebagai Cermin Keadilan Sosial

Pangan juga merupakan indikator keadilan sosial. Di banyak daerah, petani yang menanam padi justru paling rentan terhadap kemiskinan, sementara konsumen kota menikmati pangan olahan bernilai tambah tinggi. Rantai nilai pangan sering timpang: keuntungan lebih besar bocor ke bagian tengah (pedagang besar, penggilingan, distributor, importir), bukan kepada produsen di hulu.

Di sini muncul refleksi etis:

- Apakah sistem pangan kita sekadar mengejar stabilitas harga konsumen, atau juga menjamin kelayakan hidup produsen?
- Bisakah sebuah bangsa mengklaim “kemandirian pangan” bila petani sebagai pelaku utama tidak pernah keluar dari lingkaran kerentanan?

Dimensi **keadilan antarpelaku** dan **keadilan antarwilayah** (desa–kota, Jawa–luar Jawa) menjadi bagian integral dari diskusi kemandirian pangan.

4. Modernisasi Pertanian vs Keberlanjutan Ekologi

Agenda kemandirian pangan sering diterjemahkan sebagai peningkatan produksi sebesar-besarnya. Namun refleksi jangka panjang mengingatkan bahwa:

- Pembukaan lahan besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat merusak hutan, DAS, dan keanekaragaman hayati.
- Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan mungkin mengerek produksi dalam jangka pendek, tetapi menurunkan kesuburan tanah dan kualitas air dalam jangka panjang.

Pertanyaannya:

Bagaimana menyeimbangkan tuntutan “kedaulatan pangan” dengan “kelestarian ekologis”?

Kemandirian pangan sejati tidak boleh dibangun di atas bangunan krisis ekologis baru. Ketahanan pangan generasi sekarang tidak boleh dibayar dengan hancurnya daya dukung lingkungan generasi mendatang.

5. Peran Generasi Muda dan Transformasi Budaya Pangan

Salah satu kunci transformasi pangan adalah generasi muda:

- Di satu sisi, mereka adalah motor inovasi: agritech, platform digital pemasaran hasil tani, precision farming, dan sebagainya.
- Di sisi lain, pola konsumsi mereka sangat terpengaruh oleh produk olahan global (fast food, gandum, gula, daging ultra-proses).

Refleksinya:

apakah generasi muda akan terus menjadi **konsumen global** yang sangat bergantung pada komoditas impor, atau justru menjadi **agen perubahan** yang mengembangkan pangan lokal, memperpendek rantai pasok, dan menciptakan model bisnis baru berbasis keunggulan lokal?

Kemandirian pangan membutuhkan *revolusi imajinasi*: mengubah cara kita memandang makanan, petani, dan dapur sendiri. Dari sekadar objek konsumsi menjadi bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa.

6. Dari Ketergantungan ke Kemandirian: Perubahan Mindset Negara

Geopolitik pangan menuntut perubahan cara pandang negara:

- Dari kebijakan yang bersifat reaktif (impor ketika krisis, memberi subsidi ketika harga melonjak)
- Menuju strategi jangka panjang yang sistematis: reforma agraria, pendidikan ke petani, investasi riset benih, infrastruktur irigasi, cadangan strategis, dan diplomasi pangan.

Refleksi pentingnya:

Apakah negara siap keluar dari logika jangka pendek (politik

elektoral) menuju logika jangka panjang (ketahanan generasional)?

Perencanaan pangan membutuhkan horizon 20–30 tahun, bukan sekadar 5 tahun. Namun dalam praktik, agenda pangan kerap tersandera oleh siklus pemilu, tekanan kelompok kepentingan, dan konflik kebijakan antar lembaga.

B. Pertanyaan Diskusi untuk Kelas, FGD, atau Forum Publik

Berikut beberapa pertanyaan diskusi yang dapat digunakan dalam perkuliahan, seminar, atau focus group discussion:

1. Dimensi Konseptual dan Filosofis

- 1. Apa perbedaan mendasar antara “keamanan pangan” (food security), “kedaulatan pangan” (food sovereignty), dan “kemandirian pangan” (food self-sufficiency)?**

Dalam konteks Indonesia, konsep mana yang seharusnya menjadi prioritas utama, dan mengapa?

- 2. Bagaimana Anda memahami hubungan antara pangan dan kedaulatan politik?**

Bisakah sebuah negara dikatakan berdaulat bila kebutuhan pangan pokoknya sangat tergantung pada impor?

- 3. Apakah impor pangan selalu buruk?**

Diskusikan situasi di mana impor justru bisa menjadi bagian dari strategi rasional, sekaligus situasi di mana impor menimbulkan kerawanan geopolitik.

- 4. Dalam konteks etika, apakah kebijakan pangan Indonesia sudah cukup memihak petani kecil?**

Bagaimana mengukur “keadilan” dalam sistem pangan?

2. Dimensi Kebijakan dan Praktik

- 5. Bagaimana Anda menilai peran lembaga-lembaga negara (BUMN pangan, Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dll.) dalam mengelola ketergantungan impor**

dan stok nasional?

Apa kelemahan struktural yang paling mendesak diperbaiki?

6. **Konversi lahan pertanian ke non-pertanian** terjadi di banyak daerah.

Menurut Anda, kebijakan apa yang realistis untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur, permukiman, dan industri dengan perlindungan lahan pangan?

7. **Regenerasi petani** menjadi masalah serius.

Ide-ide apa yang bisa mendorong generasi muda tertarik pada sektor pangan—bukan hanya sebagai petani tradisional, tetapi sebagai technopreneur, pengolah, dan pelaku inovasi di sepanjang rantai nilai?

8. **Bagaimana posisi Indonesia dalam krisis pangan global akibat konflik Rusia–Ukraina atau fenomena iklim ekstrem?**

Apakah Indonesia sudah memiliki strategi diplomasi pangan yang memadai?

3. Dimensi Sosial-Budaya dan Konsumsi

9. **Seberapa besar peran budaya konsumsi (misalnya preferensi pada roti/gandum, fast food, dan makanan ultra-proses) dalam memperkuat ketergantungan impor?**

Apakah perubahan pola konsumsi masyarakat kota sejalan dengan visi kemandirian pangan nasional?

10. **Pangan lokal Nusantara (sagu, singkong, ubi, jagung lokal, sorgum, dll.)** sering hanya muncul dalam wacana, bukan di dapur sehari-hari.

Strategi apa yang dapat mengangkat kembali pangan lokal, bukan hanya sebagai nostalgia, tetapi sebagai bagian nyata dari sistem pangan modern?

11. **Bagaimana peran pendidikan (sekolah, universitas, media, gereja/masjid, komunitas) dalam membentuk kesadaran geopolitik pangan?**

Adakah cara kreatif untuk mengajarkan bahwa pilihan makanan

bukan hanya soal selera, melainkan juga pilihan politik dan moral?

4. Dimensi Teknologi dan Inovasi

12. **Teknologi digital dan AI** semakin banyak diterapkan di pertanian dan logistik.
Menurut Anda, di titik mana teknologi ini benar-benar membantu petani kecil, dan kapan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru (misalnya jika hanya korporasi besar yang mampu mengaksesnya)?
13. **Data pangan** (stok, luas panen, produksi) sering menjadi sumber perdebatan.
Bagaimana pemanfaatan teknologi (satelit, drone, sistem informasi terintegrasi) dapat memperbaiki kualitas data dan mengurangi ruang manipulasi untuk kepentingan tertentu?
14. **Produk pangan olahan** berbasis komoditas lokal (misalnya sagu instan, tepung singkong, snack berbahan lokal) mulai berkembang.
Apa yang menghambat skalanya menjadi besar? Apakah keterbatasan modal, teknologi, selera konsumen, atau kebijakan?

5. Dimensi Global dan Regional

15. **Jika Anda menjadi perancang kebijakan di ASEAN**, seperti apa arsitektur “keamanan pangan regional” yang ideal? Apakah perlu dibentuk cadangan pangan bersama, mekanisme saling membantu saat krisis, atau perjanjian ekspor-impor jangka panjang antar negara anggota?
16. **Banyak negara di Afrika dan Timur Tengah sangat bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina**. Pelajaran apa yang dapat diambil Indonesia dari pengalaman mereka untuk menghindari kerentanan serupa?

C. Arah Tindak Lanjut: Agenda Riset dan Kebijakan

Sebagai penutup refleksi, beberapa agenda riset dan kebijakan yang layak terus dikembangkan:

1. Pemetaan Ketergantungan Impor yang Lebih Detail

Tidak hanya pada level nasional, tetapi juga per wilayah, jenis industri, dan kelompok pendapatan. Ini membantu merancang intervensi yang lebih presisi.

2. Studi Rantai Nilai Pangan dari Hulu ke Hilir

Untuk mengidentifikasi di titik mana nilai tambah menguap dan siapa yang paling diuntungkan dari sistem pangan saat ini. Hasilnya dapat menjadi dasar reformasi tata niaga dan kebijakan persaingan usaha.

3. Eksperimen Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal

Misalnya, program makan siang sekolah berbasis pangan lokal, pilot project desa mandiri pangan dengan model bisnis yang solid, atau insentif fiskal untuk industri yang mengolah komoditas lokal.

4. Simulasi Skenario Geopolitik Pangan

Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik (system dynamics) atau pemodelan lain untuk mensimulasikan dampak berbagai skenario: embargo, perang, perubahan iklim ekstrem, dan sebagainya, terhadap ketahanan pangan nasional.

5. Kajian Etika dan Filosofi Pangan

Menggal perspektif keadilan sosial, tanggung jawab antargenerasi, teologi penciptaan (bagi yang beragama), dan filsafat kehidupan sederhana untuk menyeimbangkan logika pasar dengan nilai kemanusiaan.

D. Penutup Reflektif

Pada akhirnya, **geopolitik pangan** menantang kita untuk melihat nasi di piring, roti di meja, dan kopi di cangkir dengan cara yang berbeda. Di balik setiap butir beras, ada petani, air, tanah, kebijakan, pasar global, dan iklim yang kian tidak menentu.

Refleksi dan diskusi bukan sekadar latihan intelektual, tetapi undangan untuk bertanya:

- Di mana posisi saya sebagai warga negara dalam ekosistem pangan ini?
- Pilihan konsumsi apa yang saya ambil setiap hari, dan dampak apa yang ditimbulkannya bagi petani, lingkungan, dan kemandirian bangsa?
- Apa yang bisa saya kontribusikan—sebagai peneliti, pendidik, pembuat kebijakan, pelaku usaha, atau konsumen—untuk menggeser sistem pangan dari ketergantungan rapuh menuju kemandirian yang adil dan berkelanjutan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang diharapkan dapat menjadi bahan renungan bersama setelah membaca artikel **“Geopolitik Pangan: Antara Ketergantungan Impor dan Upaya Membangun Kemandirian Nasional.”**

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka** untuk artikel *“Geopolitik Pangan: Antara Ketergantungan Impor dan Upaya Membangun Kemandirian Nasional”*.

GLOSARIUM

1. Geopolitik pangan

Kajian tentang bagaimana produksi, distribusi, perdagangan, dan cadangan pangan digunakan sebagai sumber kekuatan, alat diplomasi, maupun instrumen tekanan antarnegara. Geopolitik pangan menyoroti ketimpangan antara negara produsen dan negara

importir, serta bagaimana kebijakan pangan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.

2. Keamanan pangan (food security)

Kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai preferensi budaya, sehingga dapat menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Konsep ini menekankan dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan (utilization), dan stabilitas pasokan. ([FAOHome](#))

3. Kedaulatan pangan (food sovereignty)

Hak rakyat, komunitas, dan negara untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertanian mereka: apa yang ditanam, bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan, berdasarkan prinsip keadilan sosial, ekologi, dan budaya lokal. Istilah ini dipopulerkan oleh gerakan petani internasional La Via Campesina sebagai kritik terhadap dominasi korporasi global dan rezim perdagangan bebas. ([viacampesina.org](#))

4. Kemandirian pangan / swasembada pangan (food self-sufficiency)

Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok (terutama komoditas strategis) dari produksi domestik, minimal pada tingkat yang menjamin stabilitas sosial-politik. Kemandirian tidak selalu berarti menutup perdagangan, tetapi mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.

5. Ketergantungan impor pangan

Situasi ketika pasokan pangan suatu negara sangat bergantung pada impor dari luar negeri, baik untuk bahan pangan pokok maupun bahan baku industri. Ketergantungan menjadi masalah geopolitik ketika sumber pasokan terkonsentrasi pada sedikit negara, atau ketika pasar global sangat volatil dan sarat kepentingan politik.

6. Cadangan pangan strategis (buffer stock)

Stok pangan yang dikelola negara (misalnya beras) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan, terutama pada masa paceklik, bencana, atau gejolak harga di pasar internasional. Cadangan ini

dapat berasal dari pembelian domestik maupun impor, dan dikelola dengan aturan pelepasan (release) dan penyerapan (procurement) yang jelas.

7. Lumbung pangan / food estate

Kawasan produksi pangan skala besar yang dirancang secara terintegrasi (tanaman, infrastruktur irigasi, logistik, dan industri pengolahan) untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Konsep ini sering digunakan sebagai bagian strategi swasembada, tetapi menimbulkan perdebatan terkait dampak sosial-lingkungan.

8. Rantai nilai pangan (food value chain)

Seluruh tahapan dari hulu ke hilir: penyediaan input (benih, pupuk, alat), produksi di lahan, penggilingan/pengolahan, transportasi, distribusi, hingga ritel dan konsumsi. Di sepanjang rantai ini terjadi pembentukan nilai tambah, pembagian margin keuntungan, sekaligus potensi distorsi (kartel, monopoli, rente).

9. Food weaponization (senjatisasi pangan)

Praktik menggunakan pangan – baik melalui blokade, embargo, manipulasi pasokan, atau pengaturan ekspor – sebagai alat untuk menekan, mengancam, atau mengendalikan pihak lain dalam konflik dan persaingan geopolitik. Contoh aktual terlihat dalam perang Rusia–Ukraina yang memanfaatkan infrastruktur gandum dan jalur Laut Hitam sebagai alat tawar terhadap negara-negara importir. ([securityconference.org](https://www.securityconference.org))

10. Diplomasi pangan (food diplomacy / grain diplomacy)

Penggunaan bantuan pangan, perjanjian pasokan jangka panjang, atau kerja sama lumbung pangan sebagai instrumen hubungan luar negeri. Negara pengeksport dapat memperkuat pengaruh, sementara negara importir berupaya mengamankan pasokan melalui kesepakatan strategis. ([securityconference.org](https://www.securityconference.org))

11. Bulog (Badan Urusan Logistik)

Lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola stok, distribusi, dan stabilisasi harga beberapa komoditas pangan pokok, terutama beras. Bulog berperan sebagai *buffer stock manager* dan

pelaksana kebijakan publik, misalnya operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan, sekaligus pihak yang mengelola sebagian impor beras. ([Center For Global Development](#))

12. Volatilitas harga pangan (food price volatility)

Fluktuasi harga yang tajam dan sulit diprediksi di pasar domestik maupun internasional, yang dapat disebabkan oleh gagal panen, spekulasi finansial, perubahan kebijakan ekspor-impor, atau konflik geopolitik. Volatilitas tinggi memperbesar risiko bagi petani dan konsumen miskin.

13. Diversifikasi pangan lokal

Upaya memperluas basis pangan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber pangan Nusantara—seperti sagu, singkong, ubi, jagung lokal, sorgum, dan aneka kacang-umbian—untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas (misalnya beras atau gandum) dan memperkuat ketahanan pangan serta identitas kuliner lokal.

14. Pertanian regeneratif (regenerative agriculture)

Pendekatan pertanian yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kualitas tanah, keanekaragaman hayati, serta siklus air, melalui praktik seperti rotasi tanam, penutup tanah (cover crops), pengurangan olah tanah, dan integrasi tanaman-ternak. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan.

15. Ketahanan iklim (climate resilience) sistem pangan

Kemampuan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan untuk mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan terkait iklim (kekeringan, banjir, gelombang panas, badai) tanpa mengalami kerusakan fungsi yang berkepanjangan. ([MDPI](#))

16. Global Food Security Index (GFSI)

Indeks komposit yang disusun lembaga internasional untuk menilai kinerja keamanan pangan negara-negara di dunia berdasarkan indikator ketersediaan, akses, kualitas, dan aspek keberlanjutan. Indonesia umumnya berada pada kelompok menengah, dengan tantangan di dimensi akses dan kualitas.

17. Financialization of food

Proses ketika komoditas pangan semakin diperlakukan sebagai instrumen finansial di pasar berjangka dan derivatif, sehingga pergerakan harga tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik (panen, stok), tetapi juga oleh spekulasi dan strategi portofolio investor keuangan. ([University of Waterloo](#))

18. Reformasi agraria

Serangkaian kebijakan untuk menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan tujuan mengurangi ketimpangan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani kecil dan masyarakat adat dalam sistem pangan nasional.

19. Petani kecil (smallholders)

Petani dengan luas lahan terbatas dan modal terbatas yang seringkali menjadi tulang punggung produksi pangan nasional, namun paling rentan terhadap fluktuasi harga, gagal panen, dan perubahan kebijakan. Dalam banyak kajian, penguatan petani kecil menjadi kunci kedaulatan dan keadilan pangan. ([University of Waterloo](#))

20. Arsitektur pangan regional (regional food security architecture)

Kerangka kerja sama antarnegara di suatu kawasan (misalnya ASEAN) untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan melalui mekanisme cadangan bersama, perjanjian perdagangan, dan sistem peringatan dini terhadap krisis pangan. (impasdqwe.dpr.go.id)

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan Internasional

Clapp, J. (2016). *Food*, 2nd ed. Cambridge: Polity Press. ([University of Waterloo](#))

Clapp, J., & Isakson, S. R. (2018). *Speculative Harvests: Financialization, Food and Agriculture*. Halifax: Fernwood Publishing.([University of Waterloo](#))

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, Agrifood Systems Transformation and Healthy Diets across the Rural–Urban Continuum*. Rome: FAO.([FAOHome](#))

FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025* (laporan PBB tentang tren kelaparan global).([Reuters](#))

La Via Campesina. (2003). “Food Sovereignty.” Dalam berbagai dokumen posisi gerakan internasional La Via Campesina.([viacampesina.org](#))

Artikel dan Kajian tentang Indonesia

Hermawan, I. (2018). “Indonesia’s Rice Policy and ASEAN Food Solidarity.” *Politica*, X(X), hlm. xx–xx.([impasdqwe.dpr.go.id](#))

Limenta, M. (tanpa tahun, ±2010-an). *Indonesia Policy on Food Security*. Policy paper tentang kebijakan ketahanan pangan Indonesia, dengan fokus pada komoditas beras, kedelai, jagung, dan gula.([citi.uph.edu](#))

Octania, G. (2021). *The Government’s Role in the Indonesian Rice Supply Chain*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).([repository.cips-indonesia.org](#))

Ruspayandi, T., Arifin, B., & kawan-kawan. (2022). “Market-Approach-Based Policy to Achieve Rice Market Stability in Indonesia.” *Sustainability*, 14(1), 1–22.([LPPM Repository](#))

Timmer, C. P. (2004). *Food Security and Rice Price Policy in Indonesia: The Economics and Politics of the Food Price Dilemma*. CGD Working Paper No. 48. Washington, DC: Center for Global Development.([Center For Global Development](#))

Artikel tentang Weaponization Pangan dan Geopolitik

Arghiroiu, G. A., dkk. (2025). "From Crisis to Resilience: A Bibliometric Analysis of Food Security Research." *Sustainability*, 17(18), 8423. (Membahas tren penelitian, termasuk tema weaponization pangan).([MDPI](#))

Munich Security Conference. (2023). *Turning Dependency Into Despair: Methods of Using Food Weaponization*. Analisis penggunaan pangan sebagai alat tekanan dalam konflik kontemporer. ([securityconference.org](#))

Samad, A. (2025). "When Food Becomes the Ultimate Weapon." *Social Works Review*, 7(1), 1–25. ([socialworksreview.com](#))

Various authors. (2024). "Food Weaponization Makes a Deadly Comeback." *Foreign Affairs*, Maret 2024. ([Foreign Affairs](#))

Zhang, X. (2024). "Russian Food Security in the Context of the Russian–Ukrainian Conflict." *Academic Forum*, 45(12), hlm. xx–xx. (Membahas mekanisme weaponization gandum dan rute Laut Hitam). ([en.nbpublish.com](#))

Sumber Tambahan dan Konteks Global

Le Monde. (2024). "Why Does Global Hunger Remain Stubbornly High?" Analisis video dan artikel tentang indikator kelaparan global dan ketimpangan antarwilayah. ([Le Monde.fr](#))

Reuters. (2025). "Global Hunger Falls but Conflict and Climate Threaten Progress, UN Says." Laporan berita mengenai temuan terbaru PBB tentang tren kelaparan dan risiko konflik–iklim. ([Reuters](#))

Reuters. (2024). "Brazil's Lula Kicks Off Global Effort to End Hunger and Poverty." Berita mengenai inisiatif Global Alliance Against Hunger and Poverty pada presidensi G20 Brasil. ([Reuters](#))

UN Agencies. (berbagai tahun). Laporan-laporan mengenai ketahanan pangan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan (FAO, WFP, IFAD, UNEP), yang relevan dengan pembahasan geopolitik pangan dan kemandirian nasional. ([FAOHome](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.1 Thinking, Access date: 10
December 2025. Prompting on Writer's account ([Rudy C
Tarumingkeng](#))
<https://chatgpt.com/c/69393a53-d5b4-8321-a741-7775f4de4b8c>